



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JEANE MARIE TULUNG
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 494711

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 3.755.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 248 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/234 m2 di KAB / KOTA KOTA BITUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.455.000.000
3. Tanah Seluas 277 m2 di KAB / KOTA KOTA BITUNG , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 519 m2 di KAB / KOTA KOTA TOMOHON , HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
5. Tanah Seluas 4781 m2 di KAB / KOTA KOTA TOMOHON , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 195.000.000

1. MOBIL, TOYOTA COROLLA / YARIS YARIS SPORT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 369.850.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 185.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.504.850.000

III. HUTANG

Rp. 624.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.880.850.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.